

*Laporan Akuntabilitas Kinerja*  
*Instansi Pemerintah*  
**( LAKIP )**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BOMBANA**

**2021**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya.

LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam mencapai visi dan misi organisasi selama tahun 2021 yang tercermin dalam pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan, sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014. LAKIP merupakan instrumen penting dalam evaluasi dan *feed back* bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Laporan ini memberikan informasi tentang pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 ini meskipun jauh dari sempurna, kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan acuan dan memberikan arah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbang Kabupaten Bombana serta berguna bagi semua pihak.

Rumbia, Januari 2022

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Bombana,

**ANISA SRI PRIHATIN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/a  
NIP. 19720414 199201 2 001



## **EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF )**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana merupakan LAKIP dari Renstra Tahun 2017-2022. Selain dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Bombana berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional, akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Balitbang sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Balitbang Prov. Sultra disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2021. Informasi yang diberikan dalam LAKIP belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan BALITBANG Kabupaten Bombana Baru terbentuk berdasarkan SK Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2016 dan efektif menjalankan roda organisasi pada awal Januari 2017

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.



## DAFTAR ISI

### BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Tugas dan Fungsi .....	3
1.4. Tujuan .....	4
1.5. Struktur Organisasi .....	5
1.6. Sumber Daya Manusia .....	10
1.7. Sarana dan Prasarana .....	12
1.8. Keuangan .....	12
1.9. Sistematika Penyajian .....	13
1.10. Kendala dan Upaya .....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	16
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 .....	16
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021 .....	18
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2021 .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
3.2. Analisa Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Kinerja .....	35
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	37
BAB IV PENUTUP .....	43





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan yang diawali dengan suatu penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang harus dijalani oleh para pelaksana pembangunan. Aspek penelitian semestinya menjadi *entry point* ke arah mekanisme pembangunan yang semakin berkualitas, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Tujuan pembangunan tidak akan tercapai dengan baik apabila perencanaannya kurang matang. Apalagi bila hal tersebut tidak diikuti dengan pengawasan yang optimal dalam pelaksanaannya terhadap kinerja pembangunan tahun sebelumnya.

Perencanaan dan evaluasi adalah serangkaian proses yang saling memberi pengaruh dan nilai. Perencanaan yang tidak dilandasi hasil evaluasi jelas kurang baik, dan cenderung mengulang kesalahan yang terjadi sebelumnya. Sebaliknya evaluasi yang tidak berpedoman pada perencanaan awal merupakan pekerjaan yang tidak mempunyai dasar.

Penyusunan perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang terjadi. Selain itu juga harus berorientasi kepada kepentingan/ aspirasi masyarakat luas. Agar perencanaan tersusun dengan baik, harus diawali dengan proses penjangkaran aspirasi masyarakat yang didukung oleh penelitian dan pengembangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian juga berperan penting bagi penyusunan kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (kebijakan publik). Hasil penelitian menjadi acuan dalam pemutakhiran model-model kebijakan untuk kemudian diimplementasikan secara konkrit dalam proses pembangunan. Menyadari pentingnya aspek penelitian dan pengembangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk meningkatkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan dalam proses pembangunan di Kabupaten Bombana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021,



merupakan amanat yang harus dijalankan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pelaksananya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemimpinan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan



- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3. Tugas dan Fungsi**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten dengan ketentuan perundang-undangan, yang terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. Dalam melaksanakan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

#### **1. Tugas**

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;





- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Kabupaten;
- h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

## 2. Kewenangan

- a) Perumusan Kebijakan pemerintah daerah dan pelaksana bidang penelitian dan pengembangan potensi daerah serta pengembangan kemasyarakatan;
- b) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di jajaran pemerintah;
- c) Pelaksanaan urusan Tata Usaha meliputi : kepegawaian, keuangan, perlengkapan sarana penelitian dan pengembangan serta rumah tangga;
- d) Evaluasi pelaksanaan.

### 1.4. Tujuan

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean goverment*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) secara periodik.



Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana tahun 2021 adalah sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban legislatif. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam mencapai visi dan misi organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2017 - 2022 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sebagai upaya memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

### **1.5. Struktur Organisasi**

Berdasarkan PERDA Nomor 3 tahun 2016, susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana terdiri atas :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat membawahi dua Sub Bagian :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan membawahi tiga Sub Bidang:
  - a. Seksi Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
  - b. Seksi Ekonomi;
  - c. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- 4) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi membawahi tiga Sub Bidang :
  - a. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. Seksi Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
  - c. Seksi Inovasi dan Teknologi.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional:

#### **1.5.1. Sekretariat**

) Tugas

Memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.



) Fungsi

1. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan
2. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akutansi dan pelaporan keuangan;
3. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtangaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
4. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi diatas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu sub bagian perencanaan dan keuangan, dan sub bagian umum dan kepegawaian yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- a. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan pembukuan keuangan, urusan akutansi dan keuangan, serta penyiapan bahan tanan pemeriksanaan.
- b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melalkukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

### **1.5.2. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan**

) Tugas

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan.



) Fungsi

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
6. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
7. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi diatas, kepala bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan oleh 3 (tiga) seksi yaitu seksi sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat desa, seksi ekonomi, dan seksi penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. **Seksi Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,



pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.

2. **Seksi Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah.
3. **Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, faslitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, paratur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyaiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi berwenang.

### **1.5.3. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi**

) Tugas



Melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

) Fungsi

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
2. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
3. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
4. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
5. penyiapan bahan, strategi , dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
7. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
8. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
9. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi diatas, Kepala Bidang bidang pembangunan, inovasi dan dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu seksi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, seksi pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, dan seksi inovasi dan teknologi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1. **Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan



kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, dan perkebunan.

2. **Seksi Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan pemukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. **Seksi Inovasi dan Teknologi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

## **1.6. Sumber Daya Manusia**

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja di Kabupaten Bombana, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja



Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana mempunyai pegawai sebanyak 22 (Dua Pulu Dua) orang pada akhir tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Berdasarkan Eselonering

No	Jabatan Struktural	Eselonering	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	II a	0	1
2	Sekretaris	III a	1	0
3	Kepala Bidang	III b	2	0
4	Kepala Sub Bagian	IV a	1	1
5	Kepala Seksi	IV a	2	4
6	Fungsional	--	0	0
7	Non Struktural	--	4	0
8	Non PNS	--	4	2
Jumlah			12	10

### 2. Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1	Golongan Ruang IV	3	1
2	Golongan Ruang III	6	5
3	Golongan Ruang II	1	0
4	Golongan Ruang I	0	0
5	Non Golongan Ruang	4	2
Jumlah		14	8

### 3. Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan Formal	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1	Sekolah Dasar	0	0
2	SLTP sederajat	0	0
3	SLTA sederajat	2	0
4	Sarjana Muda/Diploma	1	0





5	Sarjana (S1)	7	7
6	Magister (S2)	3	2
7	Doktoral (S3)	0	0
Jumlah		13	9

### 1.7. Sarana dan Prasarana

Selain sumberdaya manusia yang ada sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari :

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3		4
1	Gedung Kantor 1 (satu) unit	√		
2	Kendaraan Roda Dua 6 (enam) unit	√		
3	Laptop 10 (Sepuluh) unit	√		
4	Komputer PC 2 (dua) unit	√		√
5	Kursi Putar 13 (tiga belas) unit	√	√	
6	Meja Biro 1 (satu) unit	√		
7	Meja ½ Biro 16 (enam belas) unit	√		
8	Printer 10 (sepuluh) unit	√		
9	Lemari Arsip 6 (enam) unit	√		
10	Kipas Angin Besar 1 (satu) unit	√		
11	Kipas Angin Kecil 1 (satu) unit	√		
12	Dispenser 2 (dua) unit	√		√
13	Alat-alat Dapur 1 (satu) paket	√		
14	Papan Nama Kantor 1 (satu) paket	√		
15	Gazebo 1 (satu) unit	√		
16.	Gudang 1 (satu) unit	√		
17.	Mesin Pemotong Rumput 2 (dua) Unit	√		
18	Infocus + Layar 2 (dua) unit	√		√
19	Kamera Digital (satu) unit	√		
20	Sound System 1 (satu) set	√		
21	APAR 2 Buah	√		

### 1.8. Keuangan



Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021, mengelola dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bombana sebesar **Rp. 4.664.300.349,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.612.338.900,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.010.539.653,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 21.421.796,-

Realisasi Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 sebesar **Rp. 4.559.215.700,-** atau **98,17%** dari Pagu Anggaran sebesar **Rp. 4.664.300.349,-** dengan rincian Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.563.335.700,- atau 96,96% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.612.338.900,-, Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.975.030.000,- atau 98,82% dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 20.850.000,- atau 97,33% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.421.796,-

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

### **1.9. Sistematika Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 ini memberikan informasi dan penjelasan terhadap pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana selama Tahun 2021, yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi pada tahun tersebut. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :



## **Bab I - Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini juga memuat hal-hal umum tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

## **Bab II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Pada bab ini memuat uraian singkat mengenai rencana strategik dan perjanjian kinerja. Uraian singkat rencana strategik menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan dan Program yang akan menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana. Uraian singkat perjanjian kinerja menggambarkan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, serta indikator keberhasilan pencapaiannya.

## **Bab III - Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, serta analisis akuntabilitas keuangan termaksud didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

## **Bab IV - Penutup**

Pada bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



### **1.10. Kendala dan Upaya**

Sejumlah kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya kesediaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk mengoptimalkan penyediaan data kinerja, yaitu data dan informasi yang valid untuk pengukuran kinerja, sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi dan penyajian pelaporan kinerja dapat lebih terukur dan valid;
2. Belum optimalnya penerapan manajemen kinerja pada Seksi-seksi, sehingga dalam pencapaian kinerja Seksi-seksi mengalami sejumlah kendala dan dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Kabupaten.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja dan penerapan SAKIP Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Tim SAKIP yang terdiri dari dalam melakukan asistensi dan pendampingan dalam pengembangan data kinerja dan pengembangan SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana
2. Melakukan pertemuan secara berkala Tim SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana untuk melakukan pembinaan peningkatan kualitas SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah Provinsi untuk pembinaan evaluasi kinerja serta evaluasi keuangan.

Dengan data capaian kinerja yang telah diuraikan pada laporan ini, serta kendala dan upaya-upaya yang telah dilakukan, diharapkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana semakin baik, sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi dan Birokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan 2017 – 2022

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena Rencana Strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, daerah dan nasional serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai penjabaran dari rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan, serta sarana strategis dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas dan kedudukan daerah.

##### 2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi Kabupaten Bombana 2017 – 2022 yang tertuang dalam RPJMD, yaitu :

***“Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah)”***

Visi ini bermakna masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai. Hebat dalam artian Harmonis, Elok, Berdaya Saing Aman dan Taqwa. Sedangkan sejahtera merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan.



Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Bombana 2017 – 2022, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur.
2. Melanjutkan reformasi birokrasi.
3. Melanjutkan pembangunan ekonomi.
4. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Melanjutkan pemantapan pembangunan budaya masyarakat Bombana.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bombana 2017 – 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan dalam mendukung semua misi Bupati Bombana.

### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Bombana.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana adalah :

1. Terwujudnya pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Penelitian dan Pengembangan.



Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Rumusan sasaran didalam Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

### **2.1.3. Program**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka disusun program-program yang meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diwujudkan dengan program :
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, diwujudkan dengan program :
  - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  - Pengembangan Inovasi dan Teknologi

## **2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021**

Rencana Kinerja merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu lembaga sebagai penjabaran dari



Rencana Strategis dalam satu tahun anggaran. Rencana Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan.

Adapun penjabaran Rencana Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>A.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di terbitkan</b>	<b>6 Dokumen</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pemenuhan Pelaksanaan Tugas ASN	100 %
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administras Kepegawaian</b>	<b>22 Pegawai</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Yang Menerima Pakaian Dinas beserta atributnya	22 Pegawai





<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Brankas - Printer Epson L-120 - Printer Epson L-3110	1 Unit 3 Unit 1 Unit
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah / Jenis Bahan Logistik Kantor	30 Jenis
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah / Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU)	4 SKHU
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Bulan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 bulan
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pegawai Pengelola Sistem Informasi dan Website	2 Pegawai
<b>E</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>100%</b>
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pemeliharaan Peralatan - Pemeliharaan Sarana Kantor	62 Unit 120 Unit
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah rekening telepon, - Jumlah rekening listrik, - Jumlah rekening internet	1 rek 1 rek 1 rek
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Sopir Kendaraan Operasional - Jumlah Tenaga Kebersihan	1 Orang 1 Orang
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan Biaya Pemeliharaan dan Penyediaan BBM - Kendaraan Dinas Roda Empat - Kendaraan Dinas Roda Dua	1 Unit 4 Unit
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Gedung



## Sasaran 2 : Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>A.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah Paket Pelaksanaan Penelitian Swakelola Type B</b>	<b>6 Paket</b>
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kesesuaian Lahan Tambak untuk Budidaya Udang Vaname di Kecamatan Poleang Timur dan Poleang Selatan</li> <li>- Identifikasi Karakteristik Ekologi Potensi, Distribusi Rumput Laut/Makro Potensial di Perairan Bombana</li> <li>- Desain Klaster Pengembangan Usaha dan Rantai Pasok Rumput Laut di Kabupaten Bombana</li> <li>- Standarisasi Pelaksanaan Pembelajaran Daring Dimasa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bombana</li> <li>- Pemetaan Potensi Unggulan Berbasis Wilayah di Kabupaten Bombana</li> <li>- Penyusunan Profil Anak dan Gender di Kabupaten Bombana</li> </ul>	1 Paket  1 Paket  1 Paket  1 Paket  1 Paket  1 Paket
<b>B</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Dokumen Sistem Inovasi Daerah</b>	<b>100%</b>
1	Implementasi Puja Indah dan Replikasi Hasil Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Replikasi Hasil Inovasi Daerah	1 Dokumen
2	Pemetaan IGA dan IDSD	Jumlah Dokumen Yang di terbitkan	2 Dokumen
3	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Analisis Potensi Banjir Akibat Perubahan Tutupan Lahan Pada Kawasan Hutan Menggunakan SIG di Pulau Kabaena	1 Paket

### 2.3. Penetapan Kinerja 2021

Program, kegiatan, indikator dan target kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dijabarkan dalam suatu rencana kerja 2021 yang bertujuan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat pada awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya serta pendanaannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran.



Keseluruhan rencana kinerja, indikator dan pendanaan dijadikan Perjanjian Kinerja (PK) atau semacam kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dengan Bupati Bombana.

Adapun target kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Peningkatan Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan	Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan	79,87 %
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi dan Teknologi yang diterapkan	82,17 %
3	Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah	67,58 %
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP	100 %



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Selama kurun waktu Tahun 2021 berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Untuk mengukur kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang menjadi dasar atau tolak ukur capaian hasil kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja dilakukan dengan metode penghitungan berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran dengan cara dikuantitatifkan.

Rumusan yang digunakan untuk mengetahui presentase tingkat capaian digunakan 2 (dua) rumusan, yaitu :

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumusan :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat pencapaian, maka digunakan Rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran indikator kinerja pada tingkat kegiatan dalam laporan ini meliputi :

- a. Indikator Kinerja Masukan (*Input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan.
- b. Indikator Kinerja Keluar (*Output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik.
- c. Indikator hasil (*Outcome*) adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kajian.

Untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2021, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain



Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolak ukur capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran.

a. Pengukuran dan Analisa Capaian Kerja Tujuan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana merupakan Badan yang menangani Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Bombana. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan nilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Litbang.

Pengukuran kinerja tujuan tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator tujuan di tahun 2021 dengan target dari indikator tujuan di Badan Litbang.

NO	SASARAN/TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ TUJUAN	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	CAPAIAN 2021		CAPAIAN HINGGA TAHUN 2021
				TARGET	REAL	
1	Peningkatan Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan	Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan	79,87 %	79,87%	79,87%	100%
2.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi dan Teknologi yang diterapkan	82,17%	82,17%	82,17%	100%
3.	Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah	67,58%	67,58%	67,58%	100%
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP	100%	100%	98,17%	98,17%

b. Pengukuran dan Analisa Capaian Kerja Sasaran

Untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Tahun 2021, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolak ukur capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode



kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran.

Pencapaian sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Peningkatan Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan	79,87 % (7 Dokumen)	79,87% (7 Dokumen)	100%

Secara umum sasaran tersebut tercapai dilihat dari indikator : Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbanganyang telah dilaksanakan sangat memadai dengan target pada Tahun 2021 ini sebesar 79,87% (realisasi tercapai 100% dari target yang ditetapkan).

Realisasi sasaran berhasil tercapai dengan baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan yaitu jumlah dokumen yang dihasilkan dari kajian dan penelitian berupa sejumlah 6 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dan 1 Kajian Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik

**Sasaran 2 : Meningkatnya Inovasi Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kebijakan Inovasi dan Teknologi yang diterapkan daerah	82,17% (Pemetaan IDSD & IGA)	82,17% (Pemetaan IDSD & IGA)	100%

Secara umum sasaran tersebut tercapai dilihat dari indikator : Presentase kebijakan inovasi dan teknologi yang diterapkan daerah dengan target pada Tahun 2021 ini 82,17%.

Realisasi sasaran berhasil tercapai dengan baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan yaitu Terlaksananya Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan terpenuhinga Kapasilitator Inovasi Daerah



dalam Innovations Government Award (IGA) dengan Predikat **Kabupaten Inovatif** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

**Sasaran 3 : Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah	67,58% (Implementasi PUJA INDAH)	67,58% (Implementasi PUJA INDAH)	100%

Secara umum sasaran tersebut tercapai dilihat dari indikator : Presentase pemenuhan dan pelaksanaan inovasi daerah dengan target pada Tahun 2021 ini 67,58%.

Realisasi sasaran berhasil tercapai dengan baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan yaitu terlaksananya dan terselenggaranya Implementasi dan Replikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH) dengan terpenuhinya Sumber Daya Teknologi dan Informasi serta dengan kapasitas Sumber Daya Manusia yang Aktif dan Inovatif

**Sasaran 4 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Hasil Penilaian SAKIP	100% (DPA, LRA, Progam Kegiatan)	98,17% (DPA, LRA, Progam Kegiatan)	98,17%

Secara umum sasaran tersebut tercapai dilihat dari indikator : Hasil Penilaian SAKIP dan Realisasi Anggaran dengan target pada Tahun 2021 ini 100%.

Realisasi sasaran berhasil dicapai, yaitu 98,17% dari target yang ditetapkan yaitu dikarenakan Program Kegiatan dengan Anggaran yang diberikan lebih besar dari Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Satuan Belanja (SSB) sehingga memungkinkan penyerapan anggaran yang belum maksimal



c. Pengukuran dan Analisa Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021

Pengukuran kinerja program dan kegiatan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja program dan kegiatan di tahun 2021, dengan dari indikator kinerja program dan kegiatan di tahun 2021 sebagaimana tertuang pada Renja Tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

Indikator kinerja program adalah indikator kinerja pejabat eselon III, dan indikator kinerja kegiatan adalah indikator kinerja pejabat eselon IV.

**A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	PJ
<b>A.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di terbitkan</b>	<b>6 Dok</b>	<b>6 Dok</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretaris</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan





Dari hasil pengukuran kinerja Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum kinerja program ini berhasil dengan capaian 100%. Program ini didukung dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen perencanaan dengan realisasi 100 % dimana Penanggung Jawab kegiatan adalah Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100 % dimana Penanggung Jawab kegiatan adalah Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100 % dimana Penanggung Jawab kegiatan adalah Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100 % dimana Penanggung Jawab kegiatan adalah Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100 % dimana Penanggung Jawab kegiatan adalah Kasubag Perencanaan dan Keuangan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar Realisasi, Indikator kegiatan ini adalah jumlah Laporan/Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100 % dimana Penanggung Jawab kegiatan adalah Kasubag Perencanaan dan Keuangan



## B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	PJ
<b>B.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretaris</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 ASN	16 ASN	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Honorarium PA/KPA - Honorarium PPTK	1 Org 3 Org	1 Org 3 Org	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Honorarium PPK-SKPD - Honorarium Bendahara Pengeluaran - Honorarium Bendahara Barang - Honorarium Pembantu Bendahara - Honorarium Staf PPK-SKPD	1 Org 1 Org 1 Org 2 Org 2 Org	1 Org 1 Org 1 Org 2 Org 2 Org	100% 100% 100% 100% 100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dari hasil pengukuran kinerja Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum kinerja program ini berhasil dengan capaian 100%. Program ini didukung dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator kegiatan ini Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dimana terdapat 16 ASN. Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN, Indikator kegiatan ini Jumlah Pejabat PA/KPA dengan 1 Pejabat dan Jumlah Pejabat PPTK dengan 3 Pejabat. Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Indikator kegiatan ini Jumlah Petugas Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan adalah PPK-SKPD sebanyak 1 Orang, Bendahara Pengeluaran sebanyak 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran sebanyak 2 Orang dan Staff PPK-SKPD sebanyak 2 Orang. Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.



### C. Program : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	PJ
<b>C.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administras Kepegawaian</b>	<b>22 orang</b>	<b>22 orang</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretaris</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Yang Menerima Pakaian Dinas beserta atributnya	22 orang	22 orang	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dari hasil pengukuran kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum kinerja program ini berhasil dengan capaian 100%. Program ini didukung dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya, indikator kegiatan ini adalah jumlah keseluruhan pegawai yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 22 Orang terdiri dari PNS dan PHTT, diman tahun ini telah dicapai sebesar 100%

### D. Program : Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	PJ
<b>D.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretaris</b>
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Brangkas Printer Epson L-120 Printer Epson L-3110	1 Unit 3 Unit 1 Unit	1 Unit 3 Unit 1 Unit	100% 100% 100%	Kasubag Keuangan
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah / Jenis Bahan Logistik Kantor	30 Jenis	30 Jenis	100%	Kasubag Umum
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah / Jenis Barang Cetak dan Pengandaan	2 Jenis	2 Jenis	100%	Kasubag Umum
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU)	4 SKHU	4 SKHU	100%	Kasubag Umum



5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100%	Kasubag Umum
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Sistem Informasi dan Website	2 Orang	2 Orang	100%	Kasubag Kepegawaian

Dari hasil pengukuran kinerja Program Administrasi Umum Perangkat Daerah dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum kinerja program ini berhasil dengan capaian 100%. Program ini didukung dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator kegiatan ini Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( 1 Buah Brangkas dan 4 Unit Printer ). Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Indikator kegiatan ini Jumlah/ Jenis Bahan Logistik Kantor ( 30 Jenis ). Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Indikator kegiatan ini Jumlah/Jenis Barang Cetak dan Penggandaan (2 Jenis). Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator kegiatan ini Jumlah Surat Kabar Hariun Umum (SKHU) yang berlanggaran ( 4 SKHU ). Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.
5. Fasilitsasi Kunjungan Tamu, Indikator kegiatan ini penyediaan makanan dan minuman tamu ( 12 Bulan ). Hasil yang telah dicapai tahun ini 100%
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator kegiatan ini Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ( 12 Bulan ). Hasil yang telah dicapai pada tahun ini 100%.



7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Indikator kegiatan ini Jumlah Pegawai Pengelola Sistem Informasi dan Website ( 2 Orang ). Hasil yang telah dicapai pada tahun ini 100%.

**E. Program : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	PJ
<b>E.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretaris</b>
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Pemeliharaan Peralatan - Pemeliharaan Sarana	62 Unit 120 Unit	62 Unit 120 Unit	100% 100%	Sub. Bagian Umum

Dari hasil pengukuran kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum kinerja program ini berhasil dengan capaian 100%. Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator kegiatan ini Jumlah Pemeliharaan Peralatan ( 62 Unit ) dan Pemeliharaan Sarana Kantor ( 120 Unit ). Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.

**F. Program : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	PJ
<b>F.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretaris</b>
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah rekening telepon, -Jumlah rekening listrik, -Jumlah rekening internet	1 rek 1 rek 1 rek	1 rek 1 rek 1 rek	100% 100% 100%	Subag. Umum



2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Sopir Kendaraan Operasional	1 Orang	1 Orang	100%	Subag. Umum
		- Jumlah Tenaga Kebersihan	1 Orang	1 Orang	100%	

Dari hasil pengukuran kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum kinerja program ini berhasil dengan capaian 100%. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini didukung dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Indikator kegiatan ini Jumlah Rekening Telepon ( 1 Rekening ), Jumlah Rekening Listrik (1 Rekening) dan Jumlah Rekening Internet (1 Rekening). Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator kegiatan ini Jumlah Tenaga Sopir Kendaraan Dinas ( 1 Orang ) dan Jumlah Tenaga Kebersihan ( 1 Orang ). Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.

**G. Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	PJ
<b>F.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretaris</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan Biaya Pemeliharaan dan Penyediaan BBM - Kendaraan Dinas Roda Empat - Kendaraan Dinas Roda Dua	1 Unit 4 Unit	1 Unit 4 Unit	100% 100%	Subag. Umum
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	100%	Subag Umum



Dari hasil pengukuran kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum kinerja program ini berhasil dengan capaian 100%. Indikator kinerja program ini adalah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD). Program ini didukung dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Indikator kegiatan ini jumlah kendaraan yang mendapatkan biaya pemeliharaan dan penyediaan Bahan Bakar Minyak ( 1 Unit Kendaraan Roda Empat dan 4 Unit Kendaraan Roda Dua). Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator kegiatan ini Jumlah Gedung yang mendapatkan pemeliharaan ( 1 Unit Gedung ). Hasil yang dicapai pada Tahun ini 100%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Perbandingan realisasi Kinerja pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Peningkatan Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan	Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan	61,53% (2 dok)	61,53% (2 dok)	79,87 % (7 dok)	79,87 % (7 dok)
2.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi dan Teknologi yang diterapkan	79.76% (18 Inovasi)	79.76% (18 Inovasi)	82,17 % (25 Inovasi)	82,17 % (25 Inovasi)
3	Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah	--	--	67,58 % (2 Kegiatan)	67,58 % (2 Kegiatan)

Dari Tabel diatas, dapat terlihat dari Sasaran 1 pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang bisa dimanfaatkan untuk Kebijakan Daerah





mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 kajian yang bisa dimanfaatkan 61,53% (2 dokumen). Pada Tahun 2021 presentase kajian naik menjadi 79,87% (7 Dokumen). Dari Sasaran 2 kebijakan inovasi dan teknologi yang diterapkan juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 79,76% (18 Inovasi) naik menjadi 82,17% (25 Inovasi) pada tahun 2021

e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan	Persentase Pemanfaatan Hasil-Hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan	79,87 %	79,87 %	100%
2.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi dan Teknologi yang diterapkan	82,17 %	82,17 %	100%
3	Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase Pemenuhan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah	67,58 %	67,58 %	100%

### 3.2. ANALISA PENYEBAB KEGAGALAN/KEBERHASILAN KINERJA

Mencermati pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021, dapat terlihat bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan jika kita melihat pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana secara umum, terdapat beberapa kendala dan masalah yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Beberapa faktor yang menjadi kendala adalah sebagai berikut :

1. Aspek Tatalaksana

- a. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan masih sangat tergantung pada Pihak Ketiga, karena belum adanya tenaga





fungsiional peneliti di internal Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana. Hal ini berakibat pada pelaksanaan kegiatan memerlukan waktu yang lama.

- b. Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh pelaksana kelitbangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.
  - c. Jurnal Kelitbangan saat ini belum diajukan akreditasinya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
  - d. Komitmen dari para pemangku kepentingan untuk secara proporsional memberdayakan peran dan fungsi kelitbangan sekaligus menjadikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana sebagai mitra kerja utama
2. Aspek Sumberdaya Manusia
- a. Belum adanya tenaga fungsiional peneliti dan tenaga fungsiional perekayasa sebagai personil utama penyelenggaraan kegiatan kelitbangan, yang berdampak pada terbatasnya cakupan isu yang ditangani, serta kualitas hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai input rekomendasi kebijakan terhadap pemangku kepentingan.
  - b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan yang berdampak pada dukungan dan percepatan pelaksanaan kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.
3. Aspek Program dan Anggaran
- a. Masih perlu penajaman rumusan atas rencana topik kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada isu-isu strategis dan menjadi prioritas kebijakan daerah.
  - b. Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan jenis-jenis kegiatan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana secara lebih variatif dan dinamis terutama untuk mendorong peningkatan peran dan fungsi kelitbangan di Bombana.



#### 4. Aspek Pendukung Lainnya

- a. Kerjasama kelitbangan dengan stakeholder di tingkat pusat maupun daerah belum terwujud secara optimal, baik dalam bentuk implementasi kesepakatan kerjasama maupun penyediaan payung hukum kerjasama kelitbangan antar stakeholder.
- b. Belum tersedianya data base kelitbangan yang akurat dan up to date untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan kelitbangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan strategis.
- c. Terbatasnya sarana prasarana kerja untuk mendukung kegiatan kelitbangan seperti komputer, printer termasuk aula untuk ruang rapat yang memadai bagi pelaksanaan rapat/seminar/FGD.

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku yang mencakup penerimaan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana disampaikan berupa Laporan Keuangan. Secara rinci laporan keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel ikhtisar berikut ini :



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA DPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.424.572.902,-</b>	<b>2.341.763.300,-</b>	<b>96,58</b>	<b>100</b>	<b>82.809.602,-</b>	
<b>A.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>75.085.198,-</b>	<b>71.251.000,-</b>	<b>94,89</b>	<b>100</b>	<b>3.834.198,-</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.864.941,-	7.156.000,-	90,99	100	708.941,-	Terserapnya anggaran yang hanya 90,99% Sesuai dengan real cost yang dikeluarkan
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.414.307,-	28.950.000,-	92,16	100	2.464.307,-	Terserapnya anggaran yang hanya 92,16% Sesuai dengan real cost pembayaran
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.854.867,-	8.834.500,-	99,77	100	20.367,-	Terserapnya anggaran yang hanya 99,77% Sesuai dengan real cost pembayaran
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.951.583,-	8.403.500,-	93,88	100	548.083,-	Terserapnya anggaran yang hanya 93,88% Sesuai dengan real cost yang dikeluarkan
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.999.783,-	8.981.000,-	99,79	100	18.783,-	Anggaran yang terserap 99,79% Sesuai Real Cost Pengeluaran
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.999.717,-	8.926.000,-	99,18	100	73.717,-	Anggaran yang terserap 99,18% Sesuai Real Cost Pengeluaran
<b>B.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.612.338.900,-</b>	<b>1.563.335.700,-</b>	<b>96,96</b>	<b>100</b>	<b>49.003.200,-</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.490.198.900,-	1.467.185.700,-	98,46	100	23.013.200,-	Anggaran yang terserap 98,46% Sesuai Real Cost Pengeluaran



2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.880.000,-	56.190.000,-	72,15	100	21.690.000,-	Anggaran yang terserap 72,15% Sesuai Real Cost Pengeluaran
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.260.000,-	39.960.000,-	90,28	100	4.300.000,-	Anggaran yang terserap 90,28% Sesuai Real Cost Pengeluaran
<b>C.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	33.400.000,-	33.400.000,-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,-</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.400.000,-	33.400.000,-	100	100	750.000	Anggaran yang terserap 100% Sesuai Real Cost Pengeluaran
<b>D.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>565.928.796,-</b>	<b>552.556.416,-</b>	<b>97,64</b>	<b>100</b>	<b>13.372.380,-</b>	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.421.764,-	20.850.000,-	97,33	100	571.764,-	Anggaran yang terserap 97,33% Sesuai Real Cost Pengeluaran
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.310.974,-	19.210.000,-	99,48	100	100.974,-	Anggaran yang terserap 99,48% Sesuai Real Cost Pengeluaran
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.277.000,-	19.277.000,-	100	100	0,-	Anggaran yang terserap 100% Sesuai Real Cost Pengeluaran
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.600.000,-	9.500.000,-	98,96	100	100.000,-	Anggaran yang terserap 98,96% Sesuai Real Cost Pengeluaran
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,-	12.000.000,-	100	100	0,-	Anggaran yang terserap 100% Sesuai Real Cost Pengeluaran
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	455.319.058,-	454.219.416,-	99,76	100	1.099.642,-	Anggaran yang terserap 99,76% Sesuai Real Cost Pengeluaran
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	29.000.000,-	17.500.000,-	60,34	100	11.500.000,-	Anggaran yang terserap 60,34% Sesuai Real Cost Pengeluaran





<b>E.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>13.300.008,-</b>	<b>13.300.000,-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8,-</b>	Anggaran yang teresap 100% Sesuai Real Cost Pengeluaran
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.300.008,-	13.300.000,-	100	100	100	8,-	
<b>F.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>55.200.000,-</b>	<b>51.350.184,-</b>	<b>93,03</b>	<b>100</b>	<b>3.849.816,-</b>		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000,-	30.350.184,-	88,74	100	3.849.816,-		Anggaran yang teresap 88,74% Sesuai Real Cost Pengeluaran
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.000,-	21.000.000,-	100	100	0,-		Anggaran yang teresap 100% Sesuai Real Cost Pengeluaran
<b>G.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>69.320.000,-</b>	<b>56.570.000,-</b>	<b>81,61</b>	<b>100</b>	<b>12.750.000,-</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000,-	52.250.000,-	80,38	100	12.750.000,-		Anggaran yang teresap 94,00% Sesuai Real Cost Pengeluaran
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.320.000,-	4.320.000,-	100	100	0,-		Anggaran yang teresap 100% Sesuai Real Cost Pengeluaran
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>							
<b>A</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN</b>	<b>1.860.000.000,-</b>	<b>1.860.000.000,-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,-</b>		



1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1.860.000.000,-	1.860.000.000,-	100	100	0,-	Anggaran yang terserap 100% Sesuai Real Cost Pengeluaran
B.	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	359.727.447,-	357.452.400,-	99,37	100	2.275.047,-	
1	Implementasi Puja Indah dan Replikasi Hasil Inovasi Daerah	29.727.709,-	28.527.709,-	95,96	100	1.200.000,-	Anggaran yang terserap 95,96% Sesuai Real Cost Pengeluaran
2	Pemetaan IGA dan IDSD	29.999.738,-	28.924.691,-	96,42	100	1.075.047,-	Anggaran yang terserap 96,42% Sesuai Real Cost Pengeluaran
3	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	300.000.000,-	300.000.000,-	100	100	0,-	Anggaran yang terserap 100% Sesuai Real Cost Pengeluaran



Dengan melihat persentase pencapaian realisasi keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran dapat diserap dan direalisasikan dengan baik dan tidak terdapat hambatan/kendala yang cukup berarti dalam capaian target kinerja keuangan karena selama kurun waktu 2021 berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Bisa dikatakan pada Tahun 2021 ini pencapaian kinerja maupun keuangan berhasil dengan baik.



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wujud pertanggungjawaban yang diberikan berdasarkan pertauran yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 telah memenuhi target sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan, walaupun masih ada beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2021 kepada Bupati Bombana atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

Mengacu pada penetapan kinerja Tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana memiliki target kinerja Presentase rekomendasi hasil kajian yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan daerah sebesar 79,87%,

Hingga akhir Tahun 2021, realisasi kinerja Badan penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana adalah rekomendasi hasil kajian yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan daerah sebesar 79,87%.

Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana pada Tahun 2018 terdiri dari beberapa kegiatan yang akan menjadi dasar pembinaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagai berikut :

1. Optimalisasi koordinasi tentang kegiatan penelitian dan hasil-hasil penelitian baik di lingkungan internal Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana maupun di lingkungan eksternal, dalam hal ini hubungannya dengan kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh





SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, sehingga semua kegiatan dapat terselenggara sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Penajaman TOR/KAK kegiatan yang dilakukan di awal tahun anggaran 2018 sehingga kegiatannya dapat dilaksanakan sesuai rencana maupun target yang ingin dicapai.
3. Penentuan skala prioritas kegiatan yang akan segera dilaksanakan.

Perlunya penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen penyelenggaraan penelitian yang tepat guna, agar menghasilkan output penelitian yang berhasilguna dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

Sedangkan untuk realisasi anggaran hingga akhir Tahun 2021 mencapai **Rp. 4.559.300.349,-** atau 98,17% dari total pagu anggaran **Rp. 4.644.215.700,-** sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar **Rp. 58.084.649,-** sesuai *real cost* pengeluaran (LRA).

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana ke depan. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021 sebagaimana termuat dalam laporan ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup internal Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan ke depannya.

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BOMBANA,**

**KEPALA BADAN,**

**ANISA SRI PRIHATIN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19720414 199201 2 001